

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

LPPD

TAHUN 2018



**KECAMATAN
LALABATA**

Jln. Pemuda No. Watansoppeng
Kabupaten Soppeng Propinsi Sulawesi Selatan
Telp. 0484 21027,

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Dasar Hukum	3
B. Gambaran Umum Daerah.....	4
1 Kondisi Geografis Daerah.....	8
2 Gambaran Umum Demografis	9
3 Kondisi Ekonomi	10
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH	
A. Visi dan Misi	12
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	14
BAB III URUSAN KONKUREN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
A. Ringkasan Urusan Konkuren.....	16
B. Program dan Kegiatan.....	16
C. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.....	17
D. Kepegawaian.....	17
E. Alokasi dan Realisasi Anggaran.....	19
F. Proses Perencanaan Pembangunan.....	20
G. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan.....	21
H. Permasalahan dan Solusi.....	22
BAB VI PENUTUP.....	23

KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, maka laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Tahun 2018 dapat diselesaikan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (LPPD) merupakan instrumen pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan negara, sehingga hak dan wewenang daerah dalam mengelola otonomi tetap sejalan dengan cita – cita pembangunan nasional sebagai dasar instrumental dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal ini merupakan norma perekat hubungan hirarkis antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintah Daerah, sehingga kedudukan dan peranan Laporan Penyelenggaraan Daerah untuk dilaksanakan setiap tahun anggaran.

Merupakan suatu proses perubahan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan seiring dengan demokratisasi dalam kehidupan masyarakat yang memungkinkan pemerintah dapat melaksanakan koreksi melalui evaluasi secara menyeluruh terhadap jalannya suatu pemerintahan daerah. Laporan ini merupakan salah satu kewajiban kepala daerah kepada pemerintah melalui gubernur, dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 69 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khususnya kewajiban kepala daerah yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada masyarakat bagi Pemerintah LPPD adalah merupakan salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah dan LKPJ adalah merupakan wujud penggambaran dan konsekuensi pemilihan langsung kepala daerah yang menyebabkan adanya kesetaraan dan kemitraan hubungan antara kepala daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dengan DPRD yang menjalankan fungsi legislatif dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Di samping itu, kepala daerah berkewajiban pula untuk menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan kepada masyarakat sebagai perwujudan adanya transparansi dan akuntabilitas kepala daerah kepada masyarakat.

Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Dengan adanya LPPD ini, maka diharapkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah akan dipahami oleh masyarakat dan dapat diperoleh masukan dalam evaluasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian bagi pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah Kabupaten Soppeng. Dengan demikian pelaksanaan pemerintahan daerah akan lebih berimbang dan menjadi kerangka acuan

untuk perbaikan dan peningkatan pelaksanaan pemerintah baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi program dan kegiatan pemerintah daerah.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD) Kecamatan Lalabata tahun 2018, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya, seraya berharap, semoga segala upaya kita dalam berkiprah membangun Kabupaten Soppeng lebih baik, senantiasa memperoleh Petunjuk serta Ridho Allah SWT

Watansoppeng, 04 Januari 2019

CAMAT LALABATA,

ST. KURNIAWATY. B, S.STP, M.Si
NIP. 19791102 199810 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Soppeng tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
2. Undang - Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
3. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 69 Ayat 1, Kepala Daerah wajib Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
4. ,Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Kepada Dewan perwakilan Rakyat Daerah dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat,
5. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
6. Permendagri No. 73 tahun 2009 tentang tatacara pelaksanaan evaluasi kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

Kecamatan Lalabata merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Soppeng dan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng dan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lalabata berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor:72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Pada Kecamatan Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan uraian sebagaimana tersebut pada sub bab 2.1.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

A. Camat

a. Tugas Pokok

Camat yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan serta meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dan sekretariat kecamatan serta tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan, pengoordinasian monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum;
2. Pelaksanaan, pengoordinasian dan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
3. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa Kelurahan;
4. Pelaksanaan sebagian tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatan kecamatan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris Camat

a. Tugas Pokok

Sekretaris Camat mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan kecamatan, sesuai peraturan perundang – undangan yang berlakudan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian, Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang Umum dan Kepegawaian, Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan;
 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- C. *Sub bagian umum dan kepegawaian*
- a. Tugas Pokok

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun mengelola dan melaksanakan administrasi, urusan ketatausahaan, meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas, perlengkapan, pengelolaan kepegawaian dan tugas umum lainnya, sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.
 - b. Fungsi
 1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian;
 3. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas sub bidang umum dan kepegawaian;
 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- D. *Sub bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan*
- a. Tugas Pokok

Kepala Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi urusan perencanaan, pelaporan dan keuangan, sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.
 - b. Fungsi
 1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian perencanaan dan pelaporan dan keuangan;
 2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan;
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan;
 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- E. *Kepala seksi pemerintahan*
- a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan, mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangannya, sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.
 - b. Fungsi
 1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di seksi pemerintahan umum;
 2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi pemerintahan umum;
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi pemerintahan umum;

4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pemerintahan umum;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan, mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangannya, sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis seksi ketentraman dan ketertiban umum;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan seksi;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Kepala seksi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan dan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis seksi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

H. Kepala seksi perekonomian

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Perekonomian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan perekonomian yang menjadi kewenangannya, sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis seksiperekonomian;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi perekonomian;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi perekonomian;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi perekonomian;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I. Kepala seksi kesejahteraan rakyat

a. Tugas Pokok

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat yang menjadi kewenangannya, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis seksi kesejahteraan rakyat;
2. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi kesejahteraan rakyat;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi kesejahteraan rakyat;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi kesejahteraan rakyat;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

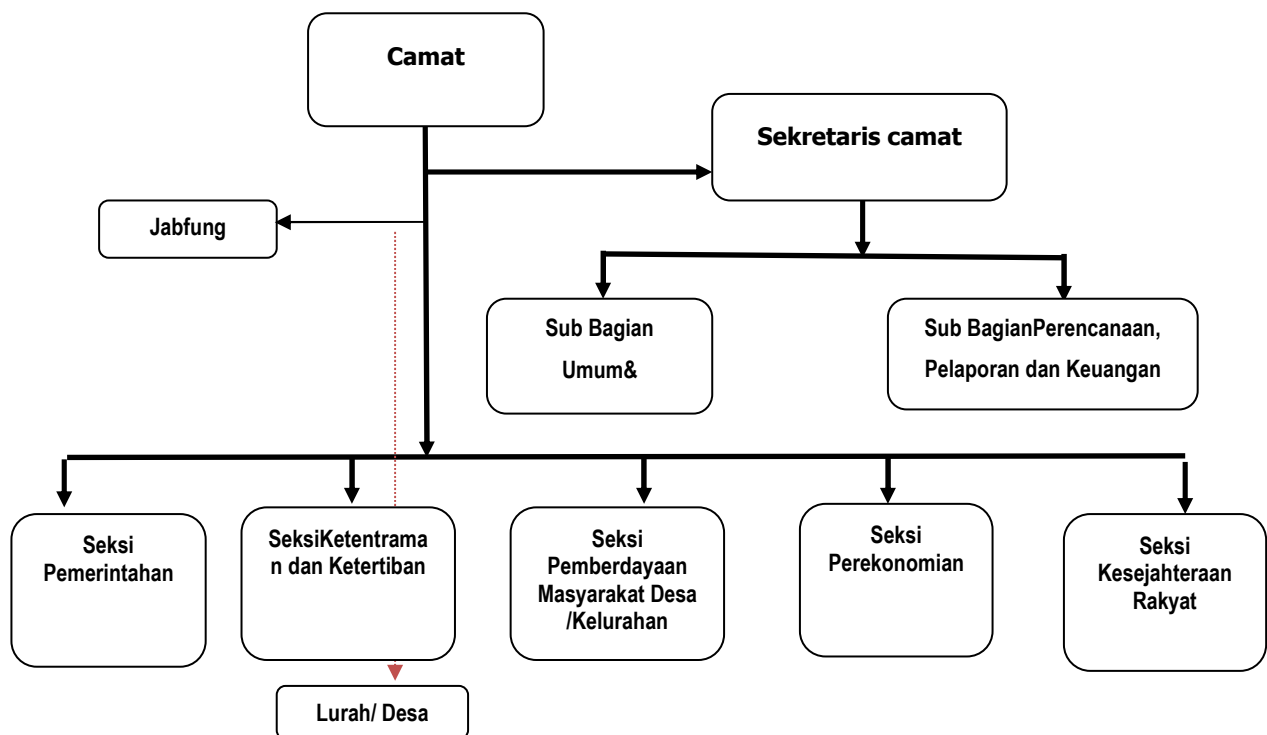
2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Kecamatan Lalabata terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
3. Seksi – Seksi
 - a. Seksi Pemerintahan
 - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan
 - d. Seksi Perekonomian
 - e. Seksi Kesejahteraan Rakyat
4. Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Lalabata dapat digambarkan sebagai berikut:

Struktur Organisasi Kecamatan Lalabata



C. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH

Gambaran umum Kecamatan Lalabata yang mencerminkan potensi yang dimiliki, dapat digambarkan sebagai berikut:

Letak geografis Kecamatan Lalabata adalah 278 km² dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kecamatan Donri-Donri
Sebelah selatan	: Kecamatan Marioriwawo
Sebelah Timur	: Kecamatan Liliraja
Sebelah Barat	: Kabupaten Barru

Pusat pemerintahan berada di Kota Watansoppeng, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata. Wilayah Yurisdiksi meliputi 7 (Tujuh) kelurahan dan 3 (Tiga) desa yaitu Kelurahan Lalabata Rilau, Kelurahan Botto, Kelurahan Lemba, Kelurahan Bila, Kelurahan Ompo, Kelurahan Lapajung, Kelurahan Salokaraja, Desa Maccile, Desa Mattabulu dan Desa Umpungeng.

Kecamatan Lalabata berada diantara 52-571 Meter². Keadaan topografinya beragam, sebahagian desa berada pada wilayah yang datar dan sebahagian lainnya beradapada wilayah dengan topografi yang berbukit-bukit. Secara keseluruhan wilayah Kecamatan Lalabata beradapada ketinggian antara 0 – 671 Meter² diatas permukaan laut. Sedangkan yang memiliki ketinggian terendah yakni Desa Maccile dengan ketinggian 52 Meter diatas permukaan laut.

Kecamatan Lalabata dilalui oleh beberapa sungai sebagai sumber air, yang dimanfaatkan sebagai pengairan yaitu sungai Lawo, dsb.

D. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

Jumlah penduduk kecamatan Lalabata pada akhir tahun 2018, tercatat sebanyak 47.682 jiwa yang tersebar di 7 Kelurahan dan 3 Desa yaitu :

- Kelurahan Lalabata Rilau	: 9.353 jiwa
- Kelurahan Botto	: 4.973 jiwa
- Kelurahan Lemba	: 4.155 jiwa
- Kelurahan Bila	: 7.031 jiwa
- Kelurahan Ompo	: 3.161 jiwa
- Kelurahan Lapajung	: 6.982 jiwa
- Kelurahan Salokaraja	: 3.065 jiwa
- Desa Maccile	: 3.333 jiwa
- Desa Mattabulu	: 1.649 jiwa
- Desa Umpungeng	: 3.980 jiwa

E. KONDISI EKONOMI

1. Pola Penggunaan lahan

Tabel 5 : Luas Potensi Lahan

No	Potensi Lahan	Luas	Ket
1	Luas Lahan sawah	3.359	Ha
2	Luas Lahan Bukan Sawah	5.269	Ha
3	Luas Lahan Bukan Pertanian	19.172	Ha
4	Luas Tegal/Kebun	66	Ha
5	Luas Hutan Rakyat	73	Ha
6	Luas Padang Rumput	321	Ha

Data : Pertanian tahun 2016

2. Keadaan Pertanian dan Peternakan

Program sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan daerah yang akan tetap mendapatkan perhatian pemerintah daerah, secara khusus dalam wilayah kecamatan Lalabata sebagian besar penduduk adalah bertani. Pada tahun 2015, petani menghasilkan produksi padi sebanyak 39.292 Ton dengan produktivitas sebesar 6,14 Ton/Hektar.

Padi merupakan tanaman pangan yang memiliki produktivitas tertinggi diantara pangan yang lain. Jagung juga memiliki produktivitas sebesar 4,93 Ton/Hektar. Produktivitas terendah adalah kacang hijau, yakni 0,15 Ton/Hektar.

Adapun rincian ternak tahun 2015, terdapat ternak sapi sebanyak 4.826 ekor, ayam buras sebesar 55.590 ekor, ayam ras petelur sebesar 16.442 ekor dan itik sebesar 10.343 ekor.

3. Pariwisata

Adapun potensi pariwisata kecamatan Lalabata adalah Makam Jera' Lompoe, Situs Petta Bulu Matanre, Permandian Alam Ompo, dsb.

4. Industri dan Perdagangan

Bidang ekonomi lain yang diharapkan mampu mendorong peningkatan ekonomi daerah untuk menciptakan kesempatan kerja dengan pemanfaatan potensi sumber daya yang ada adalah sektor industri dan perdagangan. Adapun potensi industri yang ada di Kecamatan Lalabata sebanyak 574 buah, antara lain : pasar umum 3 buah, toko/warung 354 buah, warung/rumah makan 121 buah dan koperasi sebanyak 96 buah.

5. Koperasi dan UKM

Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) merupakan soko guru perekonomian daerah yang perlu mendapatkan perhatian yang khusus kedepan. Adapun Jumlah Koperasi dan UKM secara keseluruhan sebanyak 96 unit/buah.

6. Ketenaga Kerjaan

Pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran serta pengembangan sumber daya manusia diarahkan pada pembentukan tenaga kerja profesional yang mandiri dalam suasana kehidupan serba berkesinambungan dan selaras dalam hubungan

antara sesama manusia, manusia dengan alam dan lingkungannya serta manusia dengan Tuhan. Untuk itu telah dilakukan upaya peningkatan keterampilan tenaga kerja dan pemberian modal.

Dari jumlah penduduk Kecamatan Lalabata tahun 2015 sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani sedangkan sebagian lagi memiliki mata pencaharian sebagai Nelayan, peternak, buruh (Industri, bangunan, pertambangan), pedagang, pengangkutan serta Pegawai Negeri Sipil dan TNI/Polri.

7. Pendidikan

Dalam mewujudkan Kecamatan Lalabata sebagai tempat pendidikan yang bermutu tinggi dan menjadi standar mutu pendidikan di Kabupaten Soppeng, maka perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai. Adapun tingkatan pendidikan yang telah ada selama ini adalah TK 3 buah, SD 41 buah, SLTP 5 buah dan SMU 6 buah.

8. Kesehatan.

Dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan yang optimal perlu didukung oleh sarana dan prasarana kesehatan yang cukup memadai. Sampai tahun 2015 ini, sarana dan fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Lalabata terdiri dari Puskesmas 3 unit, Pustu 7 unit, Poskesdes 7 unit dan Posyandu 54 buah.

Sedangkan Tenaga Medis berjumlah 42 orang yang terdiri dari Dokter 10 orang, Perawat 12 orang dan Bidan 20 orang.

9. Keluarga Berencana

Informasi keluarga Berencana memberikan penjelasan kepada pasangan suami istri terutama pada pasangan usia subur (PUS) sehingga dapat mengatur jumlah anak yang ideal dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan keluarga.

Di Kecamatan Lalabata pada tahun 2015 penggunaan alat / cara KB modern yang digunakan adalah suntikan = 0,48%, pil = 0,36%, kondom = 0,19%, IUD = 0,24%, implan = 0,16%, dan MOW = 0,69%.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. VISI DAN MISI

"Pemerintahan Yang Melayani Dan Lebih Baik"

Pada rumusan visi ini terkandung substansi "perwujudan visi" bahwa Kabupaten Soppeng "pemerintahannya akan lebih melayani" dan "daerahnya akan lebih baik" dan terdapat dua pokok visi yakni "pemerintahan yang melayani" dan "Kabupaten Soppeng yang lebih baik".

1. **Pemerintahan yang melayani**; bermakna bahwa dalam lima tahun kedepan kehadiran pemerintah akan semakin signifikan dalam melayani rakyatnya. Hakekat kehadiran pemerintahan adalah untuk melayani rakyatnya. Pemerintah tidak hadir untuk dilayani tetapi untuk melayani. Kondisi yang hendak dicapai dengan pokok visi ini adalah terjadinya peningkatan kinerja pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan petani dan kemajuan pertanian, pendidikan yang unggul dan murah, pelayanan publik yang prima, pariwisata yang berkembang, infrastruktur transportasi yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan kesehatan yang unggul dan murah, serta kehidupan beragama yang kondusif dan tingginya partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.
2. **Kabupaten Soppeng yang lebih baik**; bermakna bahwa Kabupaten Soppeng akan terakselerasi kemajuannya sehingga mencapai posisi sebagai daerah yang merupakan pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan. Sebagaimana Visi RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018 salah satu pokok visinya adalah pilar utama pembangunan nasional dalam hal ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan, maka Kabupaten Soppeng dalam lima tahun kedepan akan menjadi pilar utama Sulawesi Selatan dalam mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan tersebut.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut.

Tujuh Misi, Pemerintahan yang Melayani:

1. Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro-petani

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan pelayanan pada urusan pertanian secara umum sehingga berlangsung kebijakan yang berpihak kepada petani. Sebagaimana terlihat pada gambaran umum daerah bahwa mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Soppeng adalah pertanian dalam arti umum.

Misi ini terutama memprioritaskan upaya memenuhi kebutuhan sarana produksi petani terutama pupuk, sarana produksi untuk pembudidaya ikan terutama bibit ikan, keterpenuhan irigasi bagi persawahan dan upaya penerapan sistem petik-olah-jual pada usahatani yang berjalan.

2. Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan kualitas pendidikan di satu sisi serta dapat diakses dengan murah dan berkeadilan pada sisi lainnya. Misi ini terutama memprioritaskan upaya umum untuk pendidikan gratis level sekolah dasar dan menengah pertama serta bimbingan belajar gratis bagi siswa. Prioritas ini dijalankan secara terkait dengan kewajiban dasar pemerintah kabupaten dalam urusan pendidikan.

3. Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara lebih baik. Prioritas dalam misi adalah upaya dalam mengaplikasikan sistem administrasi satu pintu berbasis teknologi informasi (information technology/IT), peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, perbaikan pelayanan dan

pengadaan pemadam kebakaran setiap kecamatan, keringanan biaya melahirkan dan santunan kematian (lahir gratis, meninggal disantuni) dan meningkatkan kunjungan dan interaksi Bupati dengan warga (Bupati menyapa).

4. Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memanfaatkan potensi wisata daerah dan meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi daerah. Prioritas dalam misi ini adalah optimalisasi promosi wisata, penemuan dan pengembangan obyek wisata baru, pembangunan / perbaikan jalan 500 km dalam lima tahun dan membuka isolasi kampung terpencil.

5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi

Fokus dari misi ini adalah upaya umum mewujudkan tata kelola pemerintahan baik melalui reformasi birokrasi. Dalam misi ini prioritas diarahkan kepada keterlibatan perempuan hingga 30% dalam pemerintahan, menciptakan PNS yang kuat untuk pemerintahan yang bersih, penerapan fakta integritas tidak korupsi bagi pejabat, pemberian tunjangan kesejahteraan khusus untuk PNS dan pengadaan kendaraan operasional bagi kepala dusun.

6. Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan pelayanan kesehatan. Prioritas dalam misi ini adalah penyelenggaraan layanan dokter/bidan keluarga/pribadi untuk warga, layanan kesehatan keliling yang gratis, pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan rumah sakit, penyelenggaraan layanan puskesmas plus setaraf rumah sakit di ibu kota kecamatan dan penghargaan dan insentif khusus bagi kader posyandu.

7. Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan kehidupan beragama sebagai landasan spiritual dalam kehidupan masyarakat serta peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam kemajuan daerah. Prioritas dalam misi ini adalah fasilitasi pelatihan di balai latihan kerja (BLK) untuk pemuda, fasilitasi peningkatan keterampilan untuk persiapan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI), peningkatan kapasitas kelembagaan perempuan, meningkatkan prestasi bidang olah raga dan seni, pembangunan perumahan bagi imam masjid dan insentif khusus untuk guru mengaji.

Dua Misi, Menjadikan Soppeng yang Lebih Baik:

8. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memaksimalkan seluruh potensi Kabupaten Soppeng secara penuh untuk menjadikan daerah ini sebagai salah satu penopang utama provinsi Sulawesi Selatan. Potensi yang terdiri dari sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, diupayakan untuk dioptimalkan mendorong Kabupaten Soppeng sebagai daerah utama di Provinsi Sulawesi Selatan. Prioritas dari misi ini adalah pengelolaan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja dan lapangan usaha, serta menanggulangi kemiskinan.

9. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi

Fokus dari misi ini adalah upaya menggairahkan roda perekonomian daerah. Akselerasi roda perekonomian dimaksud berlangsung melalui investasi, baik investasi yang berkembang secara autonomous dalam masyarakat melalui usaha kecil dan menengah, maupun investasi yang berkembang secara induced dari luar masyarakat untuk usaha skala besar dan korporasi. Perputaran roda ekonomi akan semakin kencang dengan semakin

banyaknya kegiatan investasi. Untuk itu, semua usaha akan diupayakan agar bisa menarik lebih banyak investor masuk ke Soppeng

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan, Kecamatan Lalabata memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian visi dan misi, baik sebagai penanggung jawab maupun sebagai instansi pendukung.

Fokus prioritas yang menjadi penugasan kepada Kecamatan Lalabata antara lain :

1. Pencapaian **Misi ke-5**: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi.
Dengan program:
 - a. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
 - b. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
2. Pencapaian **Misi 7**: Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.

C. PRIORITAS DAERAH

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan.

Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. yaitu :

Visi: Pemerintahan Yang Melayani Dan Lebih Baik				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 5 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi a. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) b. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder.	Terbatasnya SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi serta terbatasnya sarana dan prasarana yang berkualitas sesuai kebutuhan.	Terbukanya kesempatan untuk peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
2	Misi 7 : Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.	Belum optimalnya gerakan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan.	Belum fokus dan tidak sinerginya gerakan pemberdayaan yang dilaksanakan antara pemerintah kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.	Banyak kebijakan pemerintah daerah, provinsi, pusat yang mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III

URUSAN KONKUREN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A. URUSAN KONKUREN

a. Ringkasan Urusan Wajib

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum adalah Kantor Kecamatan Lalabata, Kantor Kelurahan Lalabata Rilau, Kantor Kelurahan Ompo, Kantor Kelurahan Lemba, Kantor Kelurahan Bila, Kantor Kelurahan Botto, Kantor Kelurahan Lapajung dan Kantor Kelurahan Salokaraja.

2. Program dan Kegiatan

Rencana kegiatan Tahun 2018 yang diusulkan oleh Kecamatan Lalabata melalui pengusulan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2018, sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, sebagai berikut :
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional,
 - Penyediaan layanan kebersihan kantor
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor,
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan,
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya,
 - Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran,
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, sebagai berikut :
 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional
 - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor,
3. Program peningkatan Profesionalisme Aparatur, sebagai berikut :
 - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
4. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebagai berikut :
 - Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan
5. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, sebagai berikut :
 - Bupati Menyapa
 - Penyuluhan kantibmas
6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat Desa/Kelurahan sebagai berikut :
 - Fasilitasi pendampingan pengelolaan dana ADD di Desa,
 - Fasilitasi pembinaan guru mengaji, imam masjid dan penghulu syara'

- Fasilitas Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan,
 - Fasilitas kader posyandu,
 - Penyelenggaraan Kecamatan sehat
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Penyusunan Profil Kelurahan.

3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tingkat pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan Kantor Kecamatan Lalabata Tahun 2018 dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat belum diterapkan.

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural

Sebagai penyelenggara SKPD urusan di bidang pemerintahan umum, Kantor Kecamatan Lalabata memiliki pegawai sebanyak 91 (Sembilan Puluh Satu) orang dengan kualifikasi sebagai berikut

Tabel 4.1. Jumlah Pegawai TA. 2018

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	Magister (S2)	7
2	Sarjana (S1)	72
3	Diploma (D3)	1
4	SLTA	10
5	SMP	0
	JUMLAH	88

Sumber :SubagUmumdanKepegawaianKecamatanLalabata TA. 2018

Tabel 4.2 Kualifikasi Pendidikan TA. 2018

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	Golongan IV	2
2	Golongan III	73
3	Golongan II	13
4	Golongan I	0
	JUMLAH	88

Sumber :SubagUmumdanKepegawaianKecamatanLalabata TA. 2018

Tabel 4.3 Jumlah Pejabat Struktural TA. 2018

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	ESALON III.A	1
2	ESALON III.B	1
3	ESALON IV.A	12
4	ESALON IV.B	30
	JUMLAH	44

Sumber :Subag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Lalabata TA. 2018

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, Kecamatan Lalabata menerima alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 2.220.493.989,-** dan pada saat anggaran perubahan sebesar **Rp. 2.490.421.789,-**, maka realisasi anggaran sebesar **Rp. 2.362.348.450,-** yang terbagi sebagai berikut:

NO	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)			
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA%	SISA
1	2	3	4	5	6
1	Program Pelayanan Perkantoran	763.298.799	729.073.108	96	34.225.691
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.588.000	37.887.807	78	10.700.193
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4.961.650	2.682.060	54	2.279.590
3	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	19.593.000	19.130.500	98	462.500
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.200.520	1.179.000	98	21.520
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	16.620.000	16.556.000	100	64.000
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.545.000	5.410.000	98	135.000
7	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	179.647.400	170.423.115	95	9.224.285
8	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	487.143.229	475.804.626	98	11.338.603
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	466.935.190	423.049.790	91	43.885.400
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	301.271.390	274.027.890	91	27.243.500
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	24.480.000	24.469.000	100	11.000
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	120.883.800	106.717.900	88	14.165.900
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	20.300.000	17.835.000	88	2.465.000
3	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur	87.134.000	73.130.402	84	14.003.598
1	Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	87.134.000	73.130.402	84	14.003.598
4	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	15.500.000	15.500.000	100	-
1	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan	15.500.000	15.500.000	100	-
5	Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan	62.110.000	62.059.850	100	50.150

Kecamatan					
1	Bupati Menyapa	50.000.000	49.949.850	100	50.150
2	Penyuluhan Kamtibmas	12.110.000	12.110.000	100	-
6	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat Desa/Kelurahan	1.011.730.000	1.010.271.300	100	1.458.700
1	Fasiliatsi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa	6.700.000	6.681.300	100	18.700
2	Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid dan Penghulu Syara	543.710.000	543.710.000	100	-
3	Fasilitasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	252.710.000	251.270.000	99	1.440.000
4	Fasilitasi Kader Posyandu	193.610.000	193.610.000	100	-
5	Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	15.000.000	15.000.000	100	-
7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	83.713.800	49.264.000	59	34.449.800
1	Penyusunan Profil kelurahan	83.713.800	49.264.000	59	34.449.800
	JUMLAH	2.490.421.789	2.362.348.450	94,86	128.073.339

6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Kesesuaian pembangunan Kantor Kecamatan Lalabata antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan yang dimiliki kecamatan lalabata dengan RPJMD Kabupaten Soppeng, maka ditetapkan rencana Program dan kegiatan yang dilaksanakan selama periode 2016 – 2021 dengan 7 program.

7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pemerintahan yang ada saat ini di Kantor Kecamatan Lalabata, dirasakan masih sangat kurang memadai dan sangat memerlukan perbaikan sarana dan prasarana yang lebih baik dimasa yang akan datang.

8. Permasalahan dan Solusi

Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kantor Kecamatan Lalabata mengalami beberapa permasalahan, yaitu :

1. Dana operasional yang terbatas ;
2. Terbatasnya jumlah aparatur yang berkualitas ;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana ;
4. Distribusi personil yang kurang professional ;

Dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, maka solusinya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan program/kegiatan, sehingga dapat mendukung tercapainya penyelesaian pelaporan yang tepat waktu ;
2. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur melalui pelatihan, diklat maupun Bimtek-bimtek bagi seluruh staf kecamatan lalabata karena kegiatan tersebut sangat penting di dalam mendukung terselenggaranya “ Good Governance “.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kecamatan Lalabata adalah Laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah selama 1 tahun anggaran yang disampaikan oleh kepala camat kepada kepala daerah dan pemerintah Provinsi kepada pemerintah pusat sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kecamatan Lalabata Tahun Anggaran 2018 merupakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2018 dengan mengacu pada kewenangan Pemerintahan Kabupaten Soppeng, pelaksanaan asas Konkuren, pengelolaan keuangan, serta tugas umum pemerintahan.

Dari hasil kinerja dilaporkan pada laporan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2018, dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan yang telah dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasanterhadap seluruh kegiatan, pada umumnya dinilai berjalan dengan baik dan lancar.

Hasil pembangunan di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng pada hakekatnya merupakan hasil sinergi dari kinerja eksekutif, legislatif, masyarakat dan dunia usaha. Keberhasilan pembangunan tersebut, tidak terlepas dari itikad baik, kerja keras, kreatifitas, dan inovasidari semua pihak yang memiliki keterkaitan fungsi sesuai dengan bidang tugas dan usahanya masing – masing khususnya DPRD Kabupaten Soppeng, Forum Pimpinan Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Orsospol, Lembaga Profesi, Perguruan Tinggi, Tokoh – tokoh Agama, Insan Pers, dan seluruh lapisan masyarakat Kabuaten Soppeng Lainnya.

Hasil pembangunan yang telah dicapai pada tahun 2018, tentunya masih perlu untuk ditingkatkan kembali agar apa yang mencadi target dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Soppeng tahun 2016-2021 dapat dicapai dan dilaksanakan. Terhadap berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2018 akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun – tahun mendatang

Semoga laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kecamatan Lalabata ini dapat menjadi bahan bagi pemerintah daerah dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Pusat untuk memberikan catatan-catatan sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan pembangunan kedepan di Kabupaten Soppengguna mewujudkan Kabupaten Soppeng sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang berbudaya menuju masyarakat Kabupaten Soppeng Yang Sejahtera.

Watansoppeng, 04 Januari 2019

CAMAT LALABATA,

ST. KURNIAWATY. B, S.STP, M.Si

NIP. 19791102 199810 2 001

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018**

KABUPATEN : SOPPENG
NAMA SKPD : KECAMATAN LALABATA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan	0	%
						Jumlah Program Nasional	0	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	SOP Kasi dan Kasubag	Ada	12
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM)	3	PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN tentang SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN tentang SPM x 100%	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada	5	100 %
						- Perda No.12 Tahun 2017 ttg Penetapan APBD Thn 2018	Ada	
						- Perda No.3 Tahun 2018 ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Thn 2017	Ada	
						- Perda No.4 tahun 2018 ttg Perubahan APBD Thn 2018	Ada	
						- Perda No. 8 Tahun 2018 ttg Perubahan PERDA kabupaten No. 9 Tahun 2010 tentang RPJPD kabupaten soppeng tahun 2016-2021		

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						- Perda No. 9 Tahun 2018 ttg Perubahan PERDA kabupaten soppeng No.1 tahun 2016 ttg RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021	Ada	
						Jumlah PERDA yang Harus dilaksanakan	5	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Kesesuaian struktur jabatan dengan PP Nomor 41/2008	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jumlah jabatan yang terisi	44	100 %
						Jumlah jabatan yang ada	44	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Apa bila ada, sebutkan nama/bidang jabatan fungsional,	0	Tidak ada
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	PNS SKPD , sebanyak (Orang)	88	2
						Total PNS Kabupaten, sebanyak (personil)	5,122	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi Jumlah total SKPD yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak (orang)	23	52.27 %
			Jumlah pejabat SKPD yang ada	44				
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan	44	100 %
						Jumlah pejabat SKPD yang ada	44	

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9

5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD: - Renstra SKPD - Renja SKPD - RKA SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apa bila ada , sebutkan dokumen yang ada pada tahun 2018, sebanyak (jenis)		3 Jenis	
						1. Renstra	1		
						2. Renja	1		
						3. RKA	1		
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPDP	10	Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENJA SKPD (Program)	7	100 %	
				Jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJM,	7				
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD sebanyak (Program)	7	100 %			
				Program dalam RKA SKPD Sebanyak (Program)	7				
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPDP yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak (program)	7	100 %			
				Program dalam DPA KPD, sebanyak (Program)	7				
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total anggaran SKPD	7,519,080,762	0.62 %	
						Total APBD	1,221,166,254,700		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100% (Realisasi)	Belanja modal	263,816,390	27.74 %	
						Total belanja SKPD	7,318,859,838		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD x 100%	Total belanja pemeliharaan	42,304,000	2.10 %	
						Total belanja barang dan jasa	2,016,107,060		
	16	Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100% (Realisasi)	Total belanja pemeliharaan	42,304,000	0.58 %			
				Total belanja SKPD	7,318,859,838				
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA. Calk)	Komponen yang ada sebanyakjenis, sbb:		3 Jenis	
						1. Neraca	Ada	1	
						2. LRA	Ada	1	

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						3. Calk	Ada	1
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Apabila ada sebutkan jenis dokumennya. Daftar buku Inventaris	Ada	Ada
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD (diluar asset tanah) dibagi total asset yang dikuasai SKPD (diluar asset tanah) x 100 %	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD Total asset yang dikuasai SKPD	- 7,563,877,891	0 %
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jenis fasilitas / prasarana informasi :	Jenis fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah		1 Jenis
				1. Papan Pengumuman			Ada	1
				2. Pos Pengaduan			Tidak Ada	
				3. Leaflet			Ada	
				4. Mobil keliling			Tidak Ada	
				5. Pengumuman di Mass Media			Tidak Ada	
		6. Peta Wilayah			Ada			
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila ada, sebutkan survey kepuasan tentang ...		Tidak ada		
					Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2018 sebanyak	=		

LAMPIRAN III.2

Ket
10

Ket
10

Ket
10

--

Mengacu dokumen RKPDP tahun 2018 dan Renja-SKPD ybs.

--

Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2018 dan Renja-SKPD ybs

Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2018 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2018.

--

--

--

--

--

Ket
10
Buku Inventaris
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.



**Standar Operasional Prosedur
Kecamatan Lalabata
Kabupaten Soppeng**

2015

**Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng
Kecamatan Lalabata
JL. Attang Benteng No. 125**